

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intensitas perubahan iklim terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi karena tidak terkontrolnya emisi gas rumah kaca terutama unsur karbon yang dihasilkan oleh kegiatan industri.¹ Hal ini ditanggapi oleh masyarakat global sebagai salah satu permasalahan serius. Pada tahun 2015, ketika diadakannya *Conference of Parties* ke 21 atau disingkat dengan COP21 yang bertempat di Paris, dibentuklah perjanjian perubahan iklim yang dinamakan *Paris Agreement*.² Secara garis besar, terdapat tiga tujuan utama pembentukan *Paris Agreement*, yaitu bertujuan untuk menahan naiknya suhu permukaan bumi tidak lebih dari dua derajat celcius; melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim; meninjau upaya negara setiap lima tahun; dan memberikan bantuan dana untuk menanggulangi perubahan iklim kepada negara berkembang.³

Paris Agreement memuat komitmen negara di dunia untuk mengurangi emisi global, sehingga muncul istilah yang dikenal dengan target *Net Zero Emission*, sebuah target global untuk mengurangi produksi emisi agar dapat menahan naiknya suhu rata-rata permukaan bumi sesuai dengan upaya dari setiap negara sesuai dengan

¹ BBC Indonesia, “*Perubahan Iklim Dalam Grafik*”, diakses pada 12 Oktober 2022 melalui https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/12/091207_grafikclimate

² Robert Falkner, “The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics,” *International Affairs* 92, no. 5 (August 31, 2016): 1107–1125.

³ United Nations, “*The Paris Agreement*” diakses pada 14 Februari 2023 melalui <https://www.un.org/en/climatechange/parisagreement#:~:text=The%20Agreement%20is%20a%20legally,have%20joined%20the%20Paris%20Agreement.>

kemampuan dan target pemerintah melalui kebijakannya.⁴ Untuk mewujudkan target ini, dibentuklah kerjasama yang disebut dengan *Net Zero Coalition*. Berdasarkan laporan dari situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terdapat lebih dari tujuh puluh negara yang tergabung dalam koalisi ini, termasuk di dalamnya negara industri yang menyumbang emisi terbesar global dan salah satunya adalah Inggris.⁵ Kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi produksi emisi terutama karbon, secara signifikan dengan target tahun 2050. Berdasarkan data yang dilansir dari World Resources Institute (WRI), Inggris berada pada posisi ketiga dari negara Eropa dan posisi ke 7 di dunia diantara negara-negara Annex I sebagai penghasil emisi karbon global. Berikut adalah grafik yang menunjukkan sepuluh besar negara dengan tingkat emisi karbon dalam satuan megaton:

Tabel 1.2 Tingkat Emisi Karbon Negara Annex I Tahun 2015 - 2019

Negara	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Amerika Serikat	5189,83	5074,81	5035,74	5203,70	5081,45
Rusia	1437,91	1435,42	1459,87	1502,06	1489,59
Jepang	1163,88	1145,20	1129,22	1084,41	1048,15
Jerman	749,21	752,50	733,94	704,20	662,68
Kanada	530,09	515,67	527,23	536,87	539,75
Australia	379,63	389,17	392,26	392,79	394,50
Inggris	405,33	384,49	372,29	367,27	354,29
Turki	329,78	345,30	366,90	359,82	349,07
Italia	345,77	342,66	337,33	333,28	324,35

Sumber: *World Resources Institute 2020*⁶

⁴ Robert Falkner, "The Paris Agreement and the new logic of international climate politics", *International Affairs* 92, issue 5 (2016), DOI 10.1111/1468-2346.12708

⁵ United Nations, "Net Zero Coalition," *United Nations*, 2015, diakses pada 25 Januari 2023 melalui, <https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition#:~:text=Yes%2C%20a%20growing%20coalition%20of>

⁶ Mengpin Ge and Johannes Friedrich, "4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors," *www.wri.org* (February 6, 2020), accessed December 2, 2022, <https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors>

Dapat dilihat pada tabel bahwa produksi emisi karbon di negara Inggris telah mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dan berkontribusi dalam mengurangi emisi pada tingkat global. Namun begitu, sebagai salah satu negara berbasis industri, pembakaran bahan bakar fosil untuk dijadikan sebagai sumber tenaga listrik merupakan produsen emisi karbon terbesar di Inggris.⁷ Untuk mengatasi hal tersebut, Inggris sebagai salah satu negara yang menerapkan *Net Zero Emission* membuat kebijakan bertahap sesuai dengan komitmennya terhadap target tersebut. Pada tingkat internasional, langkah ini dimulai pada tahun 2015 pada masa kepemimpinan perdana menteri David Cameron, Inggris menandatangani *Paris Agreement*. Kemudian langkah tersebut dilanjutkan pada tahun 2016 ketika perdana menteri Inggris yaitu Theresa May mengumumkan bahwa Inggris telah meratifikasi *Paris Agreement*.⁸ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Inggris telah memulai untuk mengurangi produksi emisi dengan target *Net Zero Emission*.

Pada awal tahun 2016, Inggris secara resmi menutup tambang batu bara terakhir yang terletak di daerah Yorkshire Utara, Inggris.⁹ Beberapa tahun berikutnya, pada tahun 2019 saat pemerintahan Boris Johnson, Inggris melakukan amandemen terhadap *Climate Change Act* dengan menetapkan target *Net Zero Emission* pada tahun 2050 dan menjadi negara pertama yang menetapkan hukum tentang target *Net*

⁷ WWF, "Reducing Carbon Emissions in the UK," WWF, 2023 diakses pada 14 Februari 2023 melalui <https://www.wwf.org.uk/what-we-do/projects/reducing-carbon-emissions-uk#:~:text=Burning%20fossil%20fuels%20to%20make>

⁸ Department for Business, Energy & Industrial Strategy, "UK Ratifies the Paris Agreement," GOV.UK, 18 November 2016, diakses pada 29 Oktober 2022 melalui <https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-the-paris-agreement>

⁹ VOA, "Britain's Last Deep Coal Mine Closes," VOA, 18 December 2015, diakses pada 29 Oktober 2022 melalui <https://www.voanews.com/a/britains-last-deep-coal-mine-closes/3108889.html>

Zero Emission.¹⁰ Pada tahun yang sama, Inggris mengeluarkan kebijakan dengan menyesuaikan bantuan luar negeri untuk perubahan iklim dengan *Paris Agreement*.¹¹ Beberapa negara yang mendapatkan bantuan luar negeri ini adalah Bangladesh, Indonesia, dan Malawi. Tidak hanya itu, pada tahun 2020, sesuai dengan kesepakatan dari *Paris Agreement* di mana setiap negara harus membuat laporan terkait *Nationally Determined Contribution* atau NDC, Inggris berkomitmen dalam laporannya untuk mengurangi emisi sebesar 68% pada tahun 2030.¹² Kemudian pada tahun 2021, Inggris berperan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan konferensi iklim global COP26, yang berlokasi di Glasgow, Skotlandia.¹³

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, Inggris telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan target *Net Zero Emission* sebagai bentuk implementasi dari *Paris Agreement*. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan yang tidak mendukung target tersebut. Pada bulan Juli tahun 2020, sekretariat luar negeri Inggris mengumumkan pengurangan anggaran bantuan luar negeri untuk perubahan iklim.¹⁴ Di mana selama masa pandemi Covid-19, Inggris merupakan satu-satunya negara G7 yang mengurangi bantuan luar negeri untuk perubahan iklim dari 0.7 persen menjadi 0.5 persen dari total pendapatan

¹⁰ UK Parliament, House of Lord Library, “*Climate change targets: the road to net zero?*”, dipublikasikan pada 24 May 2021, diakses pada 7 November 2022 melalui <https://lordslibrary.parliament.uk/climate-change-targets-the-road-to-net-zero/>

¹¹ Philip Loft and Philip Brian, “Reducing the UK's aid spend in 2021”, *House of Common Library*, November 2021

¹² UNFCCC, “*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland's Nationally Determined Contribution*”, 2022

¹³ United Nations, “COP26: Together for Our Planet,” *United Nations*, 2021, diakses pada 29 Oktober 2022 melalui <https://www.un.org/en/climatechange/cop26>

¹⁴ Philip Loft and Philip Brian, “Reducing the UK's aid spend in 2021”, *House of Common Library*, November 2021

nasionalnya.¹⁵ Terkait dengan bantuan iklim ini, pada saat dilaksanakannya COP 27 yang bertempat di Mesir, Inggris dikritik karena kegagalan Inggris untuk membayar dana bantuan iklim sebesar 300 juta dollar atau 260 juta Pound sterling.¹⁶

Tidak hanya dalam pendanaan iklim, kebijakan berikutnya adalah keputusan Inggris untuk membuka kembali tambang batu bara yang berlokasi di daerah Cumbria.¹⁷ Pada tahun 2020, dewan daerah Cumbria telah menyetujui rencana pemerintah tersebut, yang kemudian tambang tersebut dibuka per November 2022 lalu setelah diresmikan oleh Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak.¹⁸ Sehubungan dengan pembukaan tambang tersebut, komite perubahan iklim Inggris berpendapat bahwa dengan adanya pembukaan kembali tambang batu bara di daerah Cumbria akan meningkatkan emisi karbon dioksida Inggris sebesar 4 Mega ton per tahun.¹⁹ Keputusan ini dinilai akan berpengaruh terhadap target yang telah ditetapkan dalam NDC Inggris terhadap *Paris Agreement* untuk mencapai target *Net Zero Emission*.

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, dapat dilihat bagaimana Inggris telah melakukan upaya dengan menerapkan kebijakan iklim sebagai langkah dalam mencapai target *Net Zero Emission*. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terdapat

¹⁵ Harriet Barber and Mason Boycott-Owen, "UK the Only G7 Country to Cut Aid during Covid Pandemic," *The Telegraph*, 12 April 2022, diakses pada 20 Maret 2023 melalui <https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/uk-g7-country-cut-aid-covid-pandemic/>

¹⁶ Karen McVeigh, "UK Criticised for Failing to Pay \$300m in Promised Climate Funds ahead of Cop27," *The Guardian*, 1 November 2022, diakses pada 3 Maret 2023 melalui <https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/01/uk-criticised-for-failing-to-pay-300m-in-promised-climate-funds-ahead-of-cop27#:~:text=The%20UK%20missed%20its%20September>

¹⁷ BBC, 2022, "Cumbria coal mine: Would it threaten the UK's climate targets?" diakses pada 1 Oktober 2022 melalui <https://www.bbc.com/news/explainers-56023895>

¹⁸ Fiona Harvey, "Cumbria Coalmine Approval Shows Sunak Does Not Care If He Is Seen as Green," *The Guardian*, December 7, 2022, diakses pada 20 Februari 2023 melalui <https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/07/cumbria-coalmine-approval-shows-sunak-does-not-care-if-he-is-seen-as-green>

¹⁹ Climate Change Committee, 2022, "Letter: Deep Coal Mining in the UK", diakses pada 23 November 2022 melalui <https://www.theccc.org.uk/publication/letter-deep-coal-mining-in-the-uk/>

kebijakan Inggris yang tidak sesuai dengan komitmennya terhadap target *Net Zero Emission* tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana terjadinya perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission*.

1.2 Rumusan Masalah

Net Zero Emission merupakan target iklim global yang ditetapkan oleh *Paris Agreement* yang diadopsi oleh Inggris sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. Target *Net Zero Emission* ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi Inggris setelah meratifikasi *Paris Agreement*. Inggris telah membuat kebijakan iklim untuk mencapai target global tersebut, pertama adalah memberikan bantuan luar negeri untuk perubahan iklim kepada negara berkembang, dan kedua yaitu menutup tambang batu bara terakhirnya yang berada di daerah Yorkshire Utara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam kebijakan iklim Inggris yang dinilai tidak sejalan dengan target *Net Zero Emission* yaitu melakukan pemotongan dana bantuan luar negeri untuk perubahan iklim dan meresmikan pembukaan kembali tambang batu bara yang berada Cumbria dinilai akan mempengaruhi target yang ada dalam NDC Inggris. Maka dari itu, perlu adanya analisis lebih lanjut terkait bagaimana perubahan kebijakan iklim Inggris dalam mencapai target *Net Zero Emission*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana perubahan kebijakan luar negeri iklim Inggris terkait agenda *Net Zero Emission* global?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri iklim Inggris berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan serta menentukan tingkat perubahan kebijakan yang diambil oleh Inggris terkait *Net Zero Emission* global.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi referensi dalam pengembangan ilmu bagi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami bagaimana terjadinya perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum agar tulisan ini dapat digunakan sebagai pembanding dalam studi kebijakan khususnya terkait perubahan kebijakan suatu negara terhadap agenda iklim global.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, terdapat beberapa bahan bacaan yang dianggap relevan untuk dijadikan referensi bagi penulis dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa referensi tersebut antara lain:

Tulisan pertama yang digunakan oleh peneliti adalah tulisan dari Katharina Rietig dan Timothy Laing yang berjudul *Policy Stability in Climate Governance: The*

*case of the United Kingdom.*²⁰ Artikel jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana Parlemen Inggris membuat sebuah kebijakan terkait isu perubahan iklim dan bagaimana Inggris mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan sebuah kebijakan perubahan iklim yang telah dibuat. Inggris membuat sebuah kebijakan besar untuk mengurangi hampir 100% dari emisi karbon di negaranya pada tahun 2050. Dalam tulisannya ini, penulis menjelaskan tentang dua faktor yang menjadi penentu dari kestabilan kebijakan perubahan iklim, yang pertama yaitu sistem politik dan yang kedua adalah opini publik. Pada tulisan ini, penulis menjelaskan bahwa kebijakan Inggris untuk membuat sebuah undang-undang perubahan iklim merupakan kebijakan yang dapat dikatakan stabil untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, ketidakstabilan juga dapat terjadi pada sistem politik parlementer Westminster yang diterapkan oleh Inggris, seperti kasus pengunduran diri perdana menteri, kemudian adanya konsensus untuk opini publik Inggris yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Peneliti melihat bahwa tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem politik dan opini publik sangat berpengaruh dalam penerapan dan kestabilan kebijakan perubahan iklim di Inggris. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagian pembahasan di mana artikel tersebut menjelaskan tentang faktor faktor yang mempengaruhi stabilitas kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim di Inggris.

²⁰ Environmental Policy and and Governance. *Policy Stability in Climate Governance*, diakses pada 7 November 2022 melalui <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/eet.1762>

Referensi kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Wahyu Yun Susanto yang berjudul Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.²¹ Dalam tulisannya, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian dari perubahan iklim dan bagaimana kondisi perubahan iklim secara global. Kemudian, penulis menjelaskan kondisi Indonesia yang dilihat dari segi geografis dan dampak perubahan iklim di Indonesia. Penulis memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tropis akan terdampak akibat perubahan iklim, salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Sehingga untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang lebih parah, Indonesia membuat kebijakan nasional dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam tulisan ini, penulis menjabarkan upaya tingkat global dan nasional Indonesia secara bertahap, dimulai dengan menjelaskan tentang pembentukan rezim dan perjanjian iklim global, diantaranya UNFCCC, *Kyoto Protocol*, dan COP perubahan iklim. Pada bagian pembahasan berikutnya, penulis menjelaskan tentang kebijakan iklim yang diambil oleh Indonesia, di mana salah satunya adalah dengan meratifikasi *Kyoto Protocol* ke dalam undang-undang nasional.

Referensi ketiga adalah artikel dengan judul Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global yang ditulis oleh Nurul Husna, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian.²² Dalam tulisan tersebut penulis menjelaskan tentang perubahan yang terjadi

²¹ Wahyu Yun Santoso, "Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim", *Hasanuddin Law Review* 1, Issue 3, December 2015

²² Nurul Husna, Mohamad Rosyidin dan Muhammad Faizal Alfian, "Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global", *Journal of International Relations* 8, No. 4, 2022.

dalam kebijakan perubahan iklim di Brazil pada masa pemerintahan presiden Jair Bolsonaro. Bolsonaro mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya mengatasi perubahan iklim, diantaranya adalah keinginannya untuk menarik Brazil untuk keluar dari *Paris Agreement* yang sudah ada sejak masa kampanye beliau. Kemudian pada tahun 2019, Brazil memutuskan untuk menolak menjadi tuan rumah konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada akhirnya digantikan oleh Spanyol. Kebijakan Bolsonaro tersebut bertolak belakang dengan kebijakan presiden sebelumnya, Fernando Collor de Mello yang membawa Brazil sebagai negara terdepan dalam menangani perubahan iklim global.

Dalam artikel ini penulis menggunakan kerangka konsep *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Hermann di mana terdapat empat indikator yang menjadi alasan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara yaitu *Leader Driven, Bureaucratic Advocacy, Domestic Restructuring*, dan *External Shock*. Artikel ini akan menjadi bahan perbandingan oleh peneliti dalam menganalisis perubahan kebijakan iklim Inggris terkait *Net Zero Emission*.

Referensi keempat yang peneliti gunakan sebagai referensi adalah artikel dengan judul *Identifying Parameters of Foreign Policy Change: A Synthetic Approach* yang ditulis oleh Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis.²³ Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan tentang parameter dalam perubahan kebijakan luar negeri. Terdapat dua parameter dalam tulisan ini pertama adalah parameter alami yang terdiri dari struktural dan konjungtur, dan parameter kedua adalah asal yang

²³ Blavoukos and Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach." (2009)

terdiri dari internasional dan domestik. Parameter struktural merupakan perubahan yang terjadi akibat perubahan sistem dalam suatu negara, sedangkan parameter konjungtur adalah perubahan kebijakan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat tiba-tiba dan sementara sehingga dapat mengganggu stabilitas kebijakan.

Dalam tulisan ini, penulis memberikan studi kasus terkait perubahan kebijakan Yunani terhadap Turki dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Turki pada tahun 1990. Penulis menjelaskan studi kasus menggunakan parameter yang telah disebutkan sebelumnya yaitu parameter struktural dan parameter konjungtur berdasarkan parameter asal yaitu internasional dan domestik. Artikel ini akan berkontribusi sebagai pembanding bagi peneliti dalam melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan kebijakan luar negeri Inggris.

Referensi terakhir adalah tulisan yang berjudul *Climate Change Policy: Can New Actors Affect Japan's Policy-Making in the Paris Agreement Era?* yang ditulis oleh Yasuko Kameyama.²⁴ Dalam artikel ini penulis menjelaskan tentang tiga peristiwa besar yang mempengaruhi perubahan kebijakan iklim di Jepang. Peristiwa pertama adalah ketika diadakannya COP 3 dan pembentukan Protokol Kyoto pada tahun 1997, peristiwa kedua adalah terjadinya ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, dan peristiwa ketiga adalah pembentukan *Paris Agreement* pada tahun 2015. Penulis berpendapat bahwa terdapat aktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan iklim di Jepang yang dipengaruhi

²⁴ Yasuko Kameyama, "Climate Change Policy: Can New Actors Affect Japan's Policy-Making in the Paris Agreement Era?", *Social Science Japan Journal* 24, No. 1, 2021

oleh tiga peristiwa besar yang telah disebutkan sebelumnya. Keputusan terkait target iklim di Jepang memang berada pada tangan pemerintah yang dalam konteks ini adalah perdana menteri, namun terdapat aktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, seperti pelaku industri bisnis, individu, dan lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan.

Artikel ini menjadi pembanding bagi peneliti dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan iklim, di mana pada artikel ini disebutkan adanya faktor internasional seperti pembentukan perjanjian iklim internasional dan faktor domestik seperti ledakan pembangkit listrik yang terjadi dapat melatarbelakangi pengambilan keputusan oleh aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan iklim di Jepang, salah satunya adalah dalam mencapai target *Net Zero Emission*.

Bahan bacaan terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran umum terkait dengan isu kebijakan iklim yang ada di beberapa negara, yaitu Inggris, Indonesia, Brazil dan Jepang yang masing-masing dibahas dalam empat bahan bacaan yang peneliti gunakan, dan satu bacaan tentang perubahan kebijakan di negara Turki. Dalam bahan bacaan tersebut dijelaskan tentang bagaimana negara merespon fenomena perubahan iklim melalui pembentukan kebijakan luar negeri dan juga domestik, faktor-faktor kestabilan kebijakan iklim dan proses perubahan kebijakan iklim negara tersebut. Namun dalam bahan bacaan yang peneliti gunakan tidak menjelaskan secara spesifik terkait pengurangan emisi atau *Net Zero Emission*.

Dalam bahan bacaan sebelumnya, peneliti melihat bahwa belum adanya pembahasan yang spesifik mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara lebih rinci tentang bagaimana perubahan kebijakan iklim terkait target *Net Zero Emission* yang dikaitkan dengan pembahasan yang ada dalam riset sebelumnya sehingga akan menghasilkan bahan bacaan yang baru terkait perubahan kebijakan negara terkait isu *Net Zero Emission*.

1.7 Kerangka Konsep

1.7.1 Foreign Policy Change

Foreign policy change merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang perubahan perilaku suatu negara berupa tindakan dan pernyataannya terkait kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional untuk menyelesaikan masalah, mencapai tujuan nasional, dan memberikan perubahan dalam lingkup internasional.²⁵ Salah satu konsep *foreign policy change* adalah menurut Jakob Gustavsson. Dalam konsep ini, Gustavsson merangkum beberapa konsep yang sudah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan sehingga membentuk konsep yang baru terkait *foreign policy change*.

Terdapat enam konsep terdahulu yang dirangkum oleh Gustavsson, yang pertama konsep dari Holsti pada tahun 1982 yang menjelaskan tentang pembentukan kembali struktur kebijakan luar negeri. Kedua adalah konsep oleh Goldman pada tahun 1988 yang menjelaskan tentang keseimbangan dalam sistem pengambilan keputusan. Berikutnya ada konsep yang dikembangkan oleh Hermann pada tahun

²⁵ Vincencio Dugis, "Explaining Foreign Policy Change", *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 2, (2008)

1990 tentang sistem pengambilan keputusan menggunakan *intervening variable*. Selanjutnya adalah konsep dari Carlsnaes pada tahun 1992 yang menjelaskan tentang interaksi secara diakronik antara agen dan struktur. Kemudian konsep dari Skidmore pada tahun 1994 yang menjelaskan pengaruh domestik dan internasional dalam perubahan kebijakan. Terakhir adalah konsep dari Rosati pada tahun 1994 yang menjelaskan tentang bagaimana transisi dapat mempengaruhi stabilitas. Keenam konsep ini memiliki beragam pendekatan yang akhirnya digunakan oleh Gustavsson dalam menjelaskan perubahan dalam kebijakan luar negeri.

Dalam tulisannya yang berjudul *How Should We Study Foreign Policy Change*, Gustavsson merangkum dan mengkombinasikan teori yang sudah dijelaskan oleh tokoh terdahulu.²⁶ Gustavsson merangkum dan membuat kesimpulan di mana perubahan kebijakan luar negeri suatu negara disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internasional dan faktor domestik yang mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk membentuk kebijakan baru. Pertama, faktor internasional. Dari segi politik, faktor internasional dilihat dari hubungan suatu negara dengan negara maupun aktor internasional lain. Sedangkan dari segi ekonomi merujuk kepada transaksi ekonomi lintas batas antar negara maupun dengan lembaga ekonomi internasional. Kedua, faktor domestik. Sama halnya dengan dengan faktor internasional, dari segi politik faktor ini berkaitan dengan kegiatan politik domestik suatu negara, seperti partai politik dan suara hasil pemungutan suara dalam masyarakat. Berikutnya faktor domestik dari segi ekonomi berupa kondisi ekonomi

²⁶ Jacob Gustavsson, "How Should We Study Foreign Policy Changes?" *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 503, Issue 1, 1999

negara yang dilihat dari pendapatan nasional, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.²⁷

Setelah mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, Gustavsson kemudian menggabungkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya dengan teori yang dikemukakan oleh Herman mengenai tingkat perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Proses perubahan kebijakan luar negeri akan menghasilkan perubahan kebijakan yang terbagi menjadi empat tingkat perubahan, tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat pertama adalah *Adjustment Changes* yang merupakan tingkat di mana mulai adanya usaha dan upaya dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam kebijakan yang ada, belum menuju perubahan yang signifikan sehingga tujuan dari kebijakan yang ada juga tidak berubah. Selanjutnya, tingkat kedua adalah *Program Changes*, merupakan tingkat di mana telah terjadi perubahan dalam program berupa cara atau metode yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah isu namun tidak mempengaruhi atau mengubah tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kemudian tingkat Ketiga, tingkatan ini adalah *Problem* atau *Goal Changes*, pada tingkat ini diketahui telah terjadi perubahan dari tujuan lama yang digantikan dengan tujuan baru yang ingin dicapai. Terakhir, tingkat keempat adalah *International Orientation Change* yang mana pemerintah negara mengubah arah kebijakan luar negeri di tingkat

²⁷ Jacob Gustavsson, "How Should We Study Foreign Policy Changes?" *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 503, Issue 1, 1999.

internasional dalam skala besar sehingga akan mempengaruhi berbagai aspek seperti aktivitas dan peran negara di tingkat internasional.²⁸

Untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan kebijakan luar negeri dalam suatu negara, menurut konsep ini setidaknya perubahan terjadi pada tingkat dua, tingkat tiga dan tingkat empat sehingga dapat dikatakan telah terjadi perubahan dalam kebijakan negara. Konsep ini dianggap dapat membantu peneliti dalam menganalisis perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission* dengan melakukan beberapa tahapan analisis, pertama dilakukan analisis terhadap apa saja faktor-faktor internasional dan domestik yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebijakan iklim Inggris kemudian akan merangkumnya sehingga didapatkan temuan penelitian yang akan menentukan pada tingkat apa perubahan yang terjadi pada kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission*.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat cara terstruktur yang digunakan peneliti dalam menganalisis, mengolah dan menyimpulkan isu yang diangkat dalam sebuah penelitian.²⁹ Untuk metodologi penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif di mana pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur ilmiah yang relevan sehingga akan menghasilkan hasil penelitian deskriptif.

²⁸ Vinsensio Dugis, "Explaining Foreign Policy Change.," *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik* 2 (2008).

²⁹ Umar Suryadi Bakry. 2019. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5-6

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif di mana peneliti akan mendeskripsikan fenomena menjabarkan gambaran umum dari objek penelitian menjadi gambaran yang lebih spesifik. Jenis penelitian deskriptif ini dipilih agar dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana terjadinya perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission* yang dilihat dari faktor penyebab perubahan dan perubahan seperti apa yang terjadi dalam kebijakan Inggris.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk batasan penelitian, peneliti akan membatasi bahasan penelitian pada tahun 2015 hingga 2022. Tahun 2015 merupakan tahun disepakatinya *Paris Agreement* di mana salah satu targetnya adalah untuk mencapai target *Net Zero Emission*. Pada tahun 2016 Inggris meratifikasi perjanjian ini dan pada tahun 2019 pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perubahan Iklim 2008 dengan membuat target *Net Zero Emission* pada tahun 2050. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah Inggris mengurangi pendanaan untuk bantuan perubahan iklim. Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah Inggris menyetujui izin untuk membuka tambang batu bara Cumbria.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian terdapat unit dan level analisis yang akan menjadi fokus peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Unit analisis merupakan objek penelitian yang akan dianalisa. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang

menjelaskan perilaku dari unit analisis.³⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah Inggris, sedangkan unit eksplanasinya adalah perubahan kebijakan terkait *Net Zero Emission*.

Berikutnya adalah tingkat atau level analisis. Dalam teori Singer, terdapat tiga level dalam analisis terhadap aktor internasional, yaitu level individu, seperti presiden sebuah negara, dan perwakilan diplomatik. Kedua adalah level nasional atau negara, analisis yang mencakup fenomena yang terjadi dalam sebuah negara seperti isu ekonomi dan isu politik. Level terakhir menurut Singer adalah level internasional, analisis terhadap sistem internasional secara menyeluruh, seperti organisasi internasional dan kerjasama internasional antar negara.³¹ Dalam penelitian ini, level analisis yang akan dibahas oleh peneliti adalah level sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa literatur yang relevan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data-data relevan yang bersumber dari buku studi hubungan internasional, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Mohtar Mas'oeed yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi". Kemudian data yang bersumber dari jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian, beberapa artikel tersebut adalah tulisan Jakob Gustavsson, "*How Should We Study*

³⁰ Mohtar Mas'oeed, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", Jakarta: LP3ES, hal 39

³¹ Singer J. David, "The Level Analysis Problem in International Relations", *World Politics* 14, no. 1, 1961. Hal. 77-92

Foreign Policy Changes?, kemudian tulisan dari Vincencio Dugis yang berjudul “*Explaining Foreign Policy Change*”.

Selain buku dan artikel jurnal ilmiah, penelitian ini menggunakan sumber dari dokument dan laporan resmi diperoleh dari situs resmi negara Inggris seperti situs *Government of United Kingdom* dan *UK Parliament*, yang diakses melalui jejaring <https://lordslibrary.parliament.uk/climate-change-targets-the-road-to-net-zero/> dan <https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-the-paris-agreement>. Untuk situs resmi dari UNFCCC dan *Paris Agreement*, diakses melalui <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention>. Selain sumber utama, terdapat juga sumber pendukung dalam penelitian ini seperti, portal berita nasional maupun internasional, yang kemudian akan dikumpulkan sehingga akan dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis yang dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah ditemukan, data-data tersebut akan dipilah sehingga menghasilkan data yang lebih spesifik untuk dijabarkan dan dianalisis lebih dalam berdasarkan setiap bab dalam penelitian ini. Adapun data-data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah yang berkaitan dengan rezim perubahan iklim, partisipasi Inggris dalam perjanjian iklim internasional, kebijakan luar negeri Inggris dalam perubahan iklim yang secara spesifik dari tahun 2015 hingga tahun 2022, kemudian data yang berkaitan dengan *Net Zero Emission* sebagai target iklim global yang ingin dicapai oleh Inggris.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan dan pemilahan terhadap data, maka peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan konsep yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya yaitu konsep *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Jakob Gustavsson yang terdiri dari faktor-faktor perubahan kebijakan luar negeri dan tingkatan pada perubahan kebijakan luar negeri. Proses analisis data yang peneliti lakukan diharapkan dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang apa saja yang menjadi alasan peneliti untuk dalam melakukan analisis terhadap perubahan kebijakan Inggris terkait target *Net Zero Emission* sebagai bentuk implementasi rezim perubahan iklim global. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II Inggris dan Agenda Iklim Global

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah terbentuknya UNFCCC sebagai rezim perubahan iklim global yang kemudian mendasari terbentuknya perjanjian iklim. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang dinamika dan titik balik Inggris dalam mengikuti rezim perubahan iklim global sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional dalam isu perubahan perubahan iklim.

BAB III Perubahan Kebijakan Luar Negeri Inggris Terkait Target *Net Zero Emission* Global

Bab ini akan menjelaskan tentang apa saja bentuk perubahan dalam kebijakan luar negeri iklim yang diambil oleh Inggris untuk mencapai target *Net Zero Emission* dan menjelaskan tentang dampak serta respon terhadap perubahan yang terjadi dalam kebijakan Inggris terkait target *Net Zero Emission* tersebut.

BAB IV Analisis Perubahan Kebijakan Inggris Terkait Target *Net Zero Emission* Global

Bab ini membahas dan menganalisis tentang perubahan kebijakan iklim Inggris terkait target *Net Zero Emission* yang dianalisis menggunakan konsep *foreign policy change* yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Inggris dan temuan dari hasil dari perubahan kebijakan Inggris terhadap target *Net Zero Emission*.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat rangkuman, kesimpulan, dan saran dari keseluruhan pembahasan yang telah mampu menjawab pertanyaan dalam penelitian.

